

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA ILOHELUMA**

Oleh

**YULPIKA
E1119151**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA OLOHELUMA**

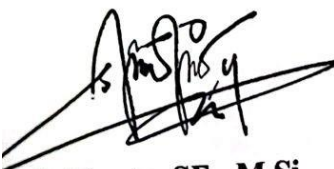
Oleh

**YULPIKA
E1119151**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal Gorontalo, 05 November 2021

PEMBIMBING I



Sulfianty, SE., M.Si
NIDN : 09 030984 03

PEMBIMBING II



Purnama Sari, SE., M.Si
NIDN : 09 120788 02

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI DESA ILOHELUMA**

Oleh
YULPIKA
E1119151

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Syamsuddin, SE.,Ak.,MM
2. Agus Baku, SE.,M.Si
3. Kartini Muslimin, SE.,M.Ak
4. Sulfianty, SE.,M.Si
5. Purnama Sari, SE.,M.Si

.....
.....
.....
.....
.....

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Musafir, SE.,M.Si
NIDN : 09 281169 01


Melinda Ibrahim, SE.,MSA
NIDN : 09 200586 01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naska dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

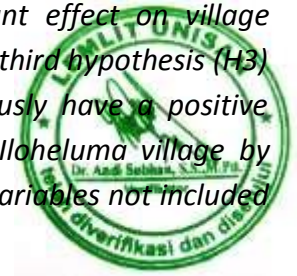
Gorontalo, 30 November 2021
Yang Membuat Pernyataan


E1013AJX563367511
Yulpika
E1119166

ABSTRACT

YULPIKA. E1119151. THE EFFECT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON THE VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN ILOHELUMA VILLAGE

The objective of this study is to find the effect of transparency and accountability on village financial management, either partially or simultaneously. This study employs a quantitative method. The population in the study covers 30 people consisting of 1 village head, 1 village secretary, 5 community members, 1 service cashier, 3 operators, 1 financial staff, 1 village office staff, and 17 people with a graduate degree of educational level. The result of the first hypothesis (H1) states that transparency has a positive and significant effect on village financial management at Iloheluma village. The result of the second hypothesis (H2) describes that accountability has a positive and significant effect on village financial management at Iloheluma village. The result of the third hypothesis (H3) indicates that transparency and accountability simultaneously have a positive and significant effect on village financial management at Iloheluma village by 0.106 or 10.6%. The remained of 9.4% is explained by other variables not included in the study.

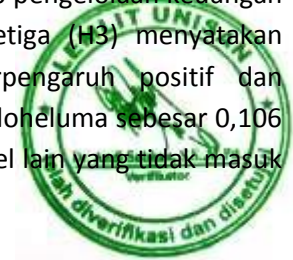


Keywords: *transparency, accountability, village financial management*

ABSTRAK

YULPIKA. E1119151. PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ILOHELUMA

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa baik secara parsial maupun secara simultan. penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian adalah 30 orang yang terdiri dari kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang, kaur 5 orang, kasir pelayanan 1 orang, operator 3 orang, staf keuangan 1 orang, staf kantor desa 1 orang, dan masyarakat 17 orang yang tingkat pendidikannya Strata Satu. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) Menyatakan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Iloheluma. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2) menyatakan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa Iloheluma. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) menyatakan transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di desa iloheluma sebesar 0,106 atau 10,6% sisanya sebesar 89,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam penelitian.



Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, pengelolaan keuangan desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Iloheluma ”**, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Ak., CSRS, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke., M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Melinda Ibrahim, SE., MSA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Sulfianty, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Purnamasari, SE., M.Si selaku pembimbing II yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah membantu dan mendukung saya. Serta dosen dan staf administrasi Universitas Ichsan Gorontalo dan rekan-rekan seperjuangan mahasiswa akuntansi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semua yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 23 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.3.1. Maksud Penelitian.....	8
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Sistem Informadi	10
2.1.1. Jenis-jenis sistem.....	11
2.1.2. Komponen sistem informasi.....	13
2.2. Pengertian Transparansi	15
2.2.1. Indikator Transparansi.....	19
2.3. Pengertian Akuntabilitas	20
2.3.1. Aspek-aspek Akuntabilitas.....	23
2.3.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas.....	25
2.3.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	25
2.3.4. Indikator Akuntabilitas	27
2.3.5. Akuntansi Pemerintahan.....	29
2.3.6. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan.....	29

2.3.7. Sistem Akuntansi Pemerintahan.....	30
2.4. Pengelolaan Keuangan Desa	31
2.5. Penelitian Terdahulu.....	33
2.6. Kerangka Pemikiran	37
2.7. Hipotesis	39
BAB III OBYEK DAN METODE DEOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1. Obyek Penelitian	40
3.2. Desain Penelitian	40
3.3. Operasional Variabel Penelitian	40
3.4. Populasi dan sample	43
3.4.1. Populasi.....	43
3.4.2. Sample.....	44
3.5. Teknik pengumpulan data.....	44
3.6. Jenis dan sumber data	45
3.6.1. Jenis Data	45
3.6.2. Sumber Data.....	45
3.7. Teknik Analisis Data.....	46
3.7.1. Analisa Korelasi	47
3.7.2. Uji f	47
3.7.3. Uji T	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.1.1. Sejarah Desa	49
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	52
4.2.1. Tanggapan Responden Untuk Variabel X1 (Transparansi)	
.....	53
4.2.2. Tanggapan Responden Untuk Variabel X2 (akuntabilitas)	
.....	57
4.2.3. Tanggapan Responden Untuk Variabel Y	
(Pengelollan Keuangan Desa)	61
4.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	64
4.3.1. Analisis Data	64
4.3.2. Uji signifikan Parsial (Uji t).....	66

4.3.3. Uji Signifikan Simultan (Uji F)	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Kesimpulan	70
5.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
JADWAL PENELITIAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Bobot alternatif skala likert.....	40
Tabel 3.2. Operasionalvariabel penelitian.....	41
Tabel 3.3. inrterpertasi Korelasi.....	46
Tabel 4.3. Rentang Skala pengukuran terhadap skor.....	52
Tabel 4.2.1 Tanggapan Responden Untuk Variabel XI (Transparansi).....	53
Tabael 4.2.2 Tanggapan Responden Untuk Variabel X2 (Akuntabilitas)	57
Tabel 4.2.3 Tanggapan Responden Untuk Variabel Y (Pengelolaan Dana Desa)	61
Tabel 4.4. Hasil analisis regresi linear berganda	65
Tabel 4.5. koefisien determinasi	66
Tabel 4.6. Hasil regresi Uji F.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar2.6. Kerangka Pemikiran.....	36
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian.....	75
Lampiran 2 Kuesioner.....	77
Lampiran 3 Tabulasi Data.....	83
Lampiran 4 Data Frekuensi.....	88
Lampiran 6 Tabel r, t Tabel	104
Lampiran 7 Surat Keterangan Penelitian	106
Lampiran 8 Surat Balasan.....	107
Lampiran 9 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	108
Lampiran 10 Hasil Turniting	109
Lampiran 11 Curriculum Vitae.....	110

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada dasarnya, desa saat ini masih menjadi kekhawatiran bagi pemerintah pusat dan sekitarnya mengenai perluasan kemajuan dan penguatan jaringan desa. desa-desa sebagai perkumpulan pemerintah yang bekerja secara lugas dengan jaringan dengan segala landasan keinginan dan kebutuhannya mempunyai tugas pokok khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas di daerah pendampingan. publik.

Dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang desa bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati, dalam system pemerintahan Negara kesatuan republic Indonesia. Dikatakan sebagai suatu desa memiliki lima unsur :

- 1). Jumlah penduduk
- 2). Luas wilayah
- 3). Bagian Wilayah kerja
- 4) perangkat kerja
- 5) sarana dan pra sarana pemerintah.

Tujuan pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam pasal 78 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dalam hal ini melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan pra sarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan desa diperlukan pimpinan dalam hal ini kepala desa yang mampu membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi untuk melaksanakan pembangunan desa serta menaati peraturan yang ada, dan administrasi desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa yang disebut nama lain. Pemerintah desa memiliki kewenangan yaitu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina ketentraman masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang kita ketahui bahwa peran seorang pemimpin atau dengan kata lain kepala desa sangat penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintah desa, tanpa adanya kepala desa penyelenggaraan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena kepala desa mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kewenangan-kewenangan yang ada. Hal ini sejalan dengan Undang-undang NO 6 tahun 2014 pasal 18 menjelaskan bahwa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat syarat adanya pemberian gaji sehingga penyelenggaraan pemerintahan ke daerah dilakukan, baik itu balas jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pemerintah pusat, dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 72 tentang kota menjelaskan, gaji kota bersumber dari: 1. Dari APBN disebut Dana Desa (DD), yang menyumbang 10% dari cadangan devisa provinsi. 2. Dari APBD dikenal sebutan Dana Desa (ADD) yang persentasenya 10% dari saldo keuangan yang diperoleh Kabupaten atau Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 3. Dari APBD, peruntukannya adalah 10% dari hasil penilaian dan tol rezim atau masyarakat perkotaan. 4. Dari bantuan keuangan mulai dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota. 5. Penghargaan atau hadiah yang tidak membatasi dari pihak luar. 6. Pembayaran unik kota, yang terdiri dari hasil bisnis, sumber daya, peningkatan diri dan bunga, kolaborasi bersama, dan pembayaran kota lainnya.

Dalam hal ini desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar. Pada tahun 2015, dana desa dialokasikan sebesar Rp.20,7 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp.280 Juta pada tahun 2016 dana desa meningkat menjadi Rp. 46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp.628 juta. Dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp.60 Triliun dengan rata-rata setiap desa Rp.800 juta.

Dari hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya dana desa telah terbukti menghasilkan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat ini sejalan dengan Undang-undang No 6 tahun 2014. Tujuan adanya dana desa ialah untuk meningkatkan pelayanan publik. Mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan: 1. Jumlah penduduk. 2. Angka kemiskinan. 3. Luas wilayah. 4. Tingkat kesulitan geografis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, dan akuntabel. Sehingga dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya Undang-undang desa tersebut, diharapkan pemerintah desa menjadi mandiri, profesional, efektif, efisien, terbuka serta bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan kegiatan yang ada di desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Namun dalam pengelolaan keuangan desa masih terdapat penyelewengan, dilihat dari data *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 lalu bila dibandingkan sektor-sektor lainnya. Data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus

korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama 2019. Korupsi anggaran desa tercatat memberi kerugian Negara hingga Rp. 32,3 miliar. Hal ini dikarenakan belum adanya transparansi dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan desa. (<https://www.diakses>22 Juni 2020).

Keterusterangan hanyalah pedoman untuk membuka keistimewaan masyarakat umum sebagai dorongan untuk mengakses data yang sah, sah dan tidak bias terkait dengan asosiasi suatu asosiasi dengan mempertimbangkan jaminan kebebasan bersama individu, kelas dan misteri Negara. Dalam administrasi cagar kota, keterusterangan diusulkan sehingga otoritas kota bertindak atau menjalankan prinsip hukum dan moral yang sesuai, dan selanjutnya sesuai perintah yang diberikan oleh daerah setempat dalam mengawasi cagar kota. Secara keseluruhan, keterusterangan dilakukan untuk memberikan klarifikasi dan tanggung jawab kepada masyarakat pada umumnya terkait proyek dan strategi yang sudah atau sedang dikerjakan serta aset yang digunakan.

Adapun tujuan dari transparansi yaitu membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Sedangkan tujuan transparansi yang dapat dirasakan oleh stakeholder dan lembaga adalah : 1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. 2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. 3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang

dilaksanakan. 4. Membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Dampak yang diberikan oleh transparansi yaitu dengan adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan jelas. Ada beberapa manfaat penting adanya transparansi ialah : 1. Mencegah terjadinya korupsi yang dilakukan para stakeholder dalam sebuah organisasi. 2. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan. 3. meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga untuk memutuskan kebijakan tertentu. 4. Memperkuat hubungan sosial baik antara masyarakat dengan masyarakat ataupun masyarakat dengan pemangku kebijakan karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. 5. Mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha. 6. Meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja lembaga. (<https://www.pengadaan.web.id/diakes> 22 juni 2020).

Sementara tanggung jawab adalah kewajiban kepada masyarakat umum, yang untuk keadaan ini adalah masyarakat pada umumnya untuk setiap tindakan yang diselesaikan. Salah satu upaya pemerintah kota dalam melaksanakan keterusterangan dan tanggung jawab adalah dengan memasang pengumuman pengeluaran dan pengakuan belanja di koridor kota. Hal ini diakhiri dengan maksud agar daerah setempat dapat memperoleh jawaban mengenai administrasi

keuangan yang diawasi oleh kota, karena usaha tersebut tidak sulit untuk dilakukan di kota.

Untuk itu kita membutuhkan keterusterangan dan tanggung jawab. Karena keuangan yang diawasi merupakan cadangan yang digunakan untuk seluruh daerah setempat. Meskipun demikian, banyak kota belum melaksanakan latihan ini, dan tidak ada upaya berbeda yang telah dilakukan untuk mewujudkan keterusterangan dan tanggung jawab rekening kota. Sehingga kota dinilai belum memenuhi keistimewaan daerah setempat, khususnya mendapatkan data tentang proyek dan penataan yang sudah dan sedang dikerjakan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh Deti Kumalasari (2016) yang berjudul transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Dalam penelitian yang kedua dilakukan oleh Risyia Umami (2017) yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, di desa Jaga Mukti, gunung sungging, cipeundeuy dan sukatani. Kecamatan Surade. Untuk penelitian yang ketiga dilakukan oleh Rizky Amalia Sugista (2017) yang berjudul Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa secara parsial variable transparansi,akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul **“PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ILOHELUMA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.?
2. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.?
3. Bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa secara simultan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian yang dilakukan pada kantor Desa Iloheluma Kec.Patilanggio Kab.Pohuwato adalah untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat diketahui tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa secara simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah desa

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengelola anggaran pada umumnya dan khususnya Desa Iloheluma

2. Bagi akademisi

Sebagai tambahan literatur, referensi dan bahan bacaan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama dan juga sebagai sumbangan pemikiran dalam menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, serta dapat mengimplementasikan konsep dan teori dalam praktek yang sebenarnya khususnya mengenai pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Dan telah memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem Informasi

Kerangka data adalah pendekatan terkoordinasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengedarkan serta menyimpan informasi, dan pendekatan terkoordinasi untuk menyimpan, mengawasi, mengontrol, dan melaporkan data sehingga asosiasi dapat mencapai tujuan yang dinyatakan. Krismiaji (2015: 16).

Menurut sidharta (1995:11) “Sebuah sistem informasi adalah sistem buatan manusia yang berisi himpunan terintegrasi dari komponen-komponen manual dan komponen-komponen terkomputerisasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data memproses data, dan menghasilkan informasi untuk pemakai”.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas mengenai sistem informasi dapat dimengerti bahwa sistem informasi adalah sekumpulan elemen-elemen yang dapat menghasilkan suatu data atau informasi yang akurat sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Hal ini sepemikiran dengan Jogiyanto H.M yang mana tertulis dalam bukunya bahwa sistem informasi adalah kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan (2005:2).

2.1.1. Jenis – jenis Sistem

Meskipun sistem memiliki bermacam-macam bentuk, sistem tersebut memiliki karakteristik yang universal. Konsep sistem mengelompokkan sistem ke dalam empat jenis yaitu :

1. sistem tertutup

Untuk lebih spesifiknya, kerangka kerja yang sepenuhnya dibatasi dari keadaannya saat ini. Tidak ada kontak dengan pertemuan luar, sehingga kerangka kerja ini tidak berdampak pada dan dipengaruhi oleh iklim yang berada di luar batas kerangka kerja. Kerangka kerja semacam itu ada pada prinsipnya, mengingat fakta bahwa sebagai aturan umum semua kerangka kerja berkolaborasi dengan keadaan mereka saat ini dengan cara mereka sendiri-sendiri.

2. sistem relatif tertutup

Untuk lebih spesifiknya kerangka kerja yang bekerja sama dengan keadaannya saat ini dengan cara yang terkendali. Kerangka semacam ini memiliki koneksi yang menghubungkan kerangka kerja dengan keadaannya saat ini dan mengontrol dampak iklim pada siklus yang diselesaikan oleh kerangka kerja. Kolaborasi ini sebagai info jika informasi didapat dari iklim, dan hasil jika hasilnya disalurkan ke pihak-pihak yang berada di luar batasan kerangka kerja. Kerangka kerja ini sangat terencana, akan membatasi, bukan membuang, dampak dari luar kerangka.

3. sistem terbuka

Secara khusus kerangka kerja yang berasosiasi dengan iklim secara tidak terkendali. Selain memperoleh kontribusi dari iklim, dan memberikan hasil bagi iklim, kerangka kerja terbuka juga mendapat halangan, atau informasi yang tidak terkendali yang akan mempengaruhi tindakan kerangka kerja. Kerangka kerja yang direncanakan secara menyeluruh dapat membatasi pengaruh yang mengganggu ini, dengan mengharapkan kemungkinan gangguan dari iklim dan kemudian membuat siklus dan proyek untuk mengatasi gangguan ini.

4. Sistem Umpan Balik

“Yaitu sistem yang menggunakan sebagian output menjadi salah satu input untuk proses yang sama di masa berikutnya. Sebuah sistem dapat dirancang untuk memberikan umpan balik guna membantu sistem tersebut mencapai tujuannya. Salah satu contoh sistem yang dirancang untuk tujuan melakukan pengendalian adalah sistem pelaporan pertanggungjawaban, dimana sistem ini menghasilkan laporan pelaksanaan kegiatan yang berisi perbandingan antara target dengan realisasi kegiatan. Atas dasar informasi dalam laporan tersebut, manajemen dapat menggunakannya sebagai umpan balik guna membuat rencana yang lebih baik di masa mendatang”.

2.1.2. Komponen Sistem Informasi

Berbicara secara komprehensif, kerangka data memiliki delapan bagian, tepatnya:

1. Alasan. Setiap kerangka data dimaksudkan untuk mencapai setidaknya satu tujuan yang memberikan panduan untuk kerangka secara keseluruhan.
2. Info. Informasi harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai kontribusi untuk kerangka kerja. Sebagian besar informasi adalah sebagai pertukaran informasi. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pada gilirannya, kerangka data pembukuan mengukur informasi dan menghasilkan data moneter, tetapi juga mengukur informasi dan menghasilkan data nonmoneter. Dengan cara ini, sebagian informasi adalah sebagai informasi non-moneter.
3. Hasil. Data yang dihasilkan oleh kerangka kerja disebut hasil. Hasil dari kerangka yang dikembalikan ke kerangka sebagai informasi disebut input. Hasil dari kerangka data pembukuan biasanya sebagai laporan keuangan dan laporan internal seperti piutang elit jatuh tempo, rencana pengeluaran, dan proyeksi pendapatan.
4. Penimbunan informasi. Informasi secara teratur disimpan untuk beberapa waktu kemudian. Informasi penyimpanan ini harus di-refresh agar tetap up dengan yang terbaru.
5. Prosesor. Informasi harus ditangani untuk menyampaikan data menggunakan segmen persiapan. Saat ini, sebagian besar organisasi

mengukur informasi mereka menggunakan PC, dengan tujuan agar data dapat dibuat dengan cepat dan tepat.

6. Pedoman dan Prosedur. Kerangka data tidak dapat menangani informasi untuk membuat data tanpa arah dan metodologi yang diperinci. Pemrograman PC (program) dibuat untuk mendidik PC dalam menangani informasi. Arah dan teknik untuk klien PC biasanya diringkas dalam sebuah buku yang disebut manual sistem.
7. Klien. Individu yang bekerja sama dengan kerangka dan memanfaatkan data yang dibuat oleh kerangka disebut klien. Dalam sebuah asosiasi, definisi tersebut menggabungkan pekerja yang melakukan dan merekam pertukaran dan perwakilan yang mengawasi dan mengontrol kerangka kerja.
8. Keamanan dan manajemen. Data yang dibuat oleh kerangka data harus tepat, bebas dari kesalahan, dan dilindungi dari akses yang tidak disetujui. Untuk mencapai kualitas data seperti itu, kerangka kerja keamanan dan kontrol harus disiapkan dan dihubungkan ke kerangka kerja.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai sistem informasi, dapat dikatakan bahwa sistem informasi sangat penting dalam sebuah organisasi dalam hal ini adalah instansi pemerintah yang mana kegunaannya untuk mengolah data keuangan dan menyajikan informasi-informasi yang akurat dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

2.2. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan asas yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan hasil yang dicapai. Lalolo (2003: 13).

Menurut Hari Subarno (2010:38) “Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan data pemerintah yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintah memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya”.

Selanjutnya Mardismo, 2010:30 “Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.”.

Dari pengertian transparansi diatas dapat dipahami bahwa transparansi yaitu untuk memberikan informasi yang terbuka dan jelas mengenai informasi keuangan ataupun informasi lainnya yang diambil oleh pemerintah untuk menjamin akses bagi setiap orang atau masyarakat yang mau memperoleh informasi yang ada.

Penggunaan standar keterusterangan dalam penggunaan pemerintahan kota memberikan kesempatan kepada daerah setempat untuk menemukan berbagai data tentang penyelenggaraan pemerintahan kota secara efektif, tulus dan non-diskriminatif. Latihan administrasi yang hebat mengharuskan pemilihan administrasi dan administrasi publik dilakukan secara terbuka dengan seberapa banyak ruang untuk kepentingan daerah seperti yang diharapkan. yang dipengaruhi oleh efeknya. Hasil dari keterusterangan pemerintah dijamin bebas minat, terutama dalam siklus dinamis ".

"Keterusterangan adalah kesempatan untuk mendapatkan latihan politik dan moneter dari otoritas publik dan pilihannya (Mardiasmo, 2009). Keterusterangan didasarkan pada kesempatan untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh orang-orang secara umum, semuanya, data yang mengidentifikasi dengan kepentingan publik. Langsung didapatkan bagi mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, Mardiasmo mengacu pada tujuan keterusterangan dalam penyelenggaraan pemerintahan kota, khususnya:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Keterusterangan pasti akan mempengaruhi administrasi. Keterusterangan akan membangun tanggung jawab pembuat strategi dengan tujuan agar komando publik atas pengaturan yang membuat spesialis dapat berjalan dengan baik.

2.2.1. Standar Transparansi

Ada enam standar keterusterangan yang dikedepankan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI), tepatnya:

1. Ada data yang mudah dan akses (cadangan, rencana penggunaan, jenis bantuan atau proyek)
2. Distribusi dan media sehubungan dengan siklus latihan dan kehalusan moneter
3. Aksesibilitas laporan sesekali tentang pemanfaatan aset dalam kemajuan proyek yang dapat diperoleh oleh masyarakat umum
4. Laporan tahunan
5. Situs asosiasi atau distribusi media
6. Aturan dalam menyebarkan data

Pedoman keterusterangan tidak hanya dikaitkan dengan masalah moneter, keterusterangan pemerintah dalam mengatur juga mencakup lima hal (Didjaja 2003: 261). Untuk lebih spesifiknya sebagai berikut:

Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.

7. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
8. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana).
9. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dan lain-lain).
10. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) “Menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.hak masyarakat yang terkait dengan penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi”.

Keterusterangan sangat vital untuk pelaksanaan pekerjaan pemerintahan dalam menunaikan perintah perseorangan. Mengingat badan publik saat ini memiliki kekuasaan untuk menentukan pilihan signifikan yang mempengaruhi banyak individu, otoritas publik harus memberikan data total tentang hal yang dilakukannya. Dengan keterusterangan, kebohongan sulit disembunyikan. Oleh

karena itu, keterusterangan adalah instrumen penting yang dapat menyisihkan uang tunai dari demonstrasi penurunan nilai.

Dalam pandangan klarifikasi ini, sebagian dari standar yang disinggung adalah, adanya pengungkapan data yang dengan mudah dipahami oleh daerah setempat, distribusi seluk-beluk dana kota, adanya laporan sesekali tentang administrasi moneter kota yang dilakukan oleh kota. pemerintah ke daerah setempat. Standar keterusterangan membuat kepercayaan bersama antara area lokal dan area lokal. pemerintah melalui penataan data yang tepat dan memuaskan.

2.2.1. Indikator Transparansi

Kristianten (2006:73) “Menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi membawa pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a. Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran”.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, untuk itu indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi”.

Untuk itu transparansi sangat diharapkan dalam sebuah organisasi guna memberikan informasi yang terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa.dengan adanya transparansi atau keterbukaan dalam sebuah organisasi tersebut maka masyarakat tidak lagi khawatir akan adanya penyelewengan terhadap anggaran yang ada. Sebab sudah diadakan keterbukaan mengenai informasi keuangan dan informasi lainnya dan masyarakat mendapatkan kemudahan akses dalam proses penyelenggaraan pemerintah, selain transparansi juga harus adanya akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terhadap semua yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

2.3. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Ikbal (2012:83)“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”.

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas menurut Masr diasmo (2012:46) adalah “kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban”.

Untuk itu dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, pemerintah desa harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan keuangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya. Pemberian informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang transparan dan akuntabel akan memberikan dampak positif untuk pemerintahan desa, karena akuntabilitas akan menunjukkan seberapa baik kinerja pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, pencegahan penyelewengan keuangan desa, dan akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa.

Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta serta masyarakat memadai memiliki pertanggungjawaban

(akuntabilitas) kepada publik (masyarakat umum) sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Dalam pasal 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta umpan balik bagi pemimpin organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui :

- a. Usaha untuk membuat para aparat pemerintah mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan.
- b. Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai akuntabilitas, dapat dipahami bahwa akuntabilitas adalah suatu kewajiban seseorang atau kelompok dalam sebuah organisasi untuk mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan, pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3.1. Aspek-aspek Akuntabilitas

Adapun aspek-aspek akuntabilitas sebagai berikut :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok dan institusi dengan Negara dan masyarakat, pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi individu, kelompok dan institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu dalam akuntabilitas, hubungan terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*accountability is result oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini setiap individu, kelompok dan institusi diuntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*accountability requires reporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok dan institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan, dalam

dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja. Sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah)”.

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*accountability meaningless without consequences*)

Akuntabilitas adalah Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut bisa berupa penghargaan atau sanksi.

5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*accountability improves performance*)

Tujuan utama dari akuntabilitas adalah memperbaiki kinerja pemerintahan desa, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu, kelompok, dan institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja”.

2.3.2. Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Pelaksanaan tanggung jawab di dalam organisasi pemerintah dapat dipertimbangkan melalui standar tanggung jawab yang menyertai:

1. Harus ada tanggung jawab dari pelopor dan semua staf organisasi untuk menangani pelaksanaan misi sehingga bertanggung jawab
2. . Harus ada kerangka kerja yang dapat menjamin pemanfaatan aset dapat diandalkan dengan hukum dan pedoman utama
3. . Harus memiliki pilihan untuk menunjukkan derajat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus diatur untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan hasil dan keuntungan yang didapat
5. Harus lugas, jujur, lugas, dan kreatif sebagai pendorong perubahan penyelenggaraan kantor pemerintahan melalui penyegaran strategi dan metode perkiraan penyajian laporan kesiapan pertanggungjawaban.

2.3.3. Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa

Sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan desa bertujuan untuk :

1. Memberi pengakuan dan penghargaan terhadap kota-kota saat ini beserta ragamnya saat penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi kota-kota dalam tatanan terlindung Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan pemerataan bagi setiap orang Indonesia.
3. Melindungi dan mendorong tradisi, adat dan budaya jejaring provinsi
4. Potensi dan sumber daya kota untuk bantuan pemerintah bersama
5. Membentuk pemerintahan kota yang cakap, produktif dan berdaya, terbuka, dan bertanggung jawab

Meningkatkan administrasi publik bagi penduduk setempat untuk mempercepat pengakuan bantuan pemerintah publik. Tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkungan dicirikan sebagai komitmen pemerintah provinsi untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten dalam kaitannya dengan kemandirian wilayah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dapat diukur baik sebagai sejauh kualitas dan jumlahnya. Pemerintah lingkungan sebagai penghibur secara lokal dalam menyelesaikan kewajiban, kekuatan dan komitmen pemerintah terdekat. Tanggung jawab berisi komitmen untuk menyajikan dan melaporkan semua latihan, khususnya di bidang organisasi moneter, ke pertemuan tingkat yang lebih signifikan. Media pertanggungjawaban tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, namun juga memasukkan bagian dari kesederhanaan mendapatkan data, baik secara lugas atau tersirat, secara lisan atau direkam sebagai hard copy, sehingga tanggung jawab dapat mengisi iklim yang berfokus pada transparansi sebagai alasan untuk tanggung jawab.

2.3.4. Indikator Akuntabilitas

Menurut Rasul (2012:82) menyebutkan bahwa akuntabilitas dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu :

- a. Pertanggungjawaban hukum
- b. Pertanggungjawaban kinerja
- c. Pertanggungjawaban program
- d. Pertanggungjawaban kebijakan
- e. Pertanggungjawaban finansial

Adapun indikator Akuntabilitas menurut (Loina Lalolo Krina P, 2010:98) dibagi menjadi lima yaitu :

- a. Proses pembuatan sebuah keputusan
- b. Akurasi dan kelengkapan informasi
- c. Kejelasan dari sasaran kebijakan
- d. Penyebarluasan informasi
- e. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Adapun indikator dalam penelitian ini menggunakan indikator sebagaimana dalam teori Rasul (2012:82) yaitu :

- a. Pertanggungjawaban hukum
- b. Pertanggungjawaban kinerja
- c. Pertanggungjawaban program
- d. Pertanggungjawaban kebijakan
- e. Pertanggungjawaban finansial

Untuk itu akuntabilitas dan transparansi mempunyai kaitan dengan adanya akuntansi pemerintahan yang mana akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis. Dikarenakan kemajuan dari sebuah Negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa, karena tidak ada Negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Ini berarti basis kemajuan sebuah Negara ditentukan oleh kemajuan desa.

2.3.5. Akuntansi pemerintahan

Pembukuan pemerintah adalah akun dan pengumuman pertukaran yang terjadi di organisasi pemerintah. Sementara itu, sebagaimana ditunjukkan oleh Ismaya (2006: 307) menyatakan bahwa pembukuan administrasi adalah suatu aplikasi pembukuan di bidang rekening negara (uang rakyat), khususnya dalam tahap pelaksanaan pengeluaran termasuk semua dampak yang ditimbulkannya, baik cepat maupun lambat. lebih tahan lama di semua tingkat unit pemerintah.

Mengingat sebagian dari definisi di atas mengenai pembukuan pemerintah, cenderung dianggap bahwa pembukuan administrasi merupakan asosiasi yang diidentifikasi dengan organisasi pemerintah dan berbagai instansi lain yang tidak didorong oleh pendapatan, pembukuan juga dapat memberikan data yang dapat digunakan secara dinamis. Sebagaimana disadari bahwa pembukuan, secara khusus adalah pencatatan, pengumpulan, penyiapan dan pengenalan informasi, pencatatan pertukaran sehingga dapat menciptakan data bagi individu yang membutuhkannya.

2.3.6. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Menurut Baswir (2000: 11) kualitas pemerintahan meliputi:

1. Sebuah. Karena keinginan untuk mencari manfaat tidak komprehensif dalam bisnis dan pelaksanaan yayasan pemerintah, dalam pembukuan pemerintah, pencatatan manfaat dan kemalangan tidak boleh dimanfaatkan.

2. Karena organisasi pemerintah tidak eksklusif seperti dalam organisasi, tidak penting untuk mencatat kepemilikan pribadi dalam pembukuan pemerintah
3. Karena pengaturan pembukuan administrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pengaturan otoritas publik negara yang bersangkutan, jenis pembukuan pemerintah kontras mulai dari satu negara kemudian ke negara berikutnya, bergantung pada kerangka otoritas publik.
4. Karena kapasitas pembukuan pemerintah adalah mencatat, mengelompokkan, menjumlahkan, dan melaporkan pengakuan penggunaan rencana pengeluaran suatu negara, maka pelaksanaan pembukuan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari instrumen administrasi moneter dan pengaturan pengeluaran setiap negara.

2.3.7. Sistem Akuntansi Pemerintahan

Secara khusus, tidak ada tulisan tentang pengertian atau pengertian pembukuan moneter wilayah atau kerangka kerja pembukuan moneter provinsi. Namun demikian, penataan tersebut bagaimanapun juga dapat dilihat melalui pemahaman terhadap kerangka pembukuan yang ada, kemudian pengaturan definisi tersebut digunakan dalam lingkup ruang publik. Sebagaimana diindikasikan oleh Halim (2001: 35) pembukuan moneter teritorial dapat dicirikan sebagai interaksi pengakuan, perkiraan, pencatatan, dan pengumuman pertukaran keuangan (moneter) dari suatu lokal (wilayah, wilayah, kota) yang digunakan sebagai data dalam penyelesaian pilihan keuangan oleh pihak. pihak yang membutuhkan.

Tanjung (2009: 35) mencirikan pembukuan moneter teritorial sebagai cara menuju pencatatan, perakitan, dan menyimpulkan dengan tujuan tertentu dalam pikiran mengenai tindakan, pertukaran dan peristiwa terkait uang yang pada umumnya bersifat moneter dan mengungkapkan hasil dalam organisasi masalah pemerintah sesuai standar kemandirian dan bantuan dengan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari penjelasan definisi-definisi di atas mengenai pembukuan moneter daerah, sangat dapat disimpulkan bahwa pembukuan keuangan provinsi merupakan perkembangan dari metode-metode yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan rencana yang matang yang tampaknya menyampaikan data sebagai laporan keuangan yang akan dimanfaatkan oleh pertemuan dalam dan pertemuan luar pemerintah terdekat dalam dinamika keuangan.

2.4. Pengelolaan Keuangan desa

Berdasarkan Pemendagri No 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Matinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Administrasi Moneter kota. Dalam mewujudkan administrasi keuangan kota, pemerintah kota hendaknya menggunakan standar administrasi keuangan kota, agar uang kota diawasi secara spesifik berdasarkan standar yang lugas, bertanggung jawab, partisipatif dan dilakukan secara tepat dan dengan disiplin belanja.

Penyelenggaraan dana kota diawasi dalam waktu satu tahun anggaran, dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sesuai dengan pedoman Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, kemampuan untuk mengawasi rekening kota dipegang oleh Pemerintah Kota. kepala kota. Kepala kota adalah pemegang kekuasaan pemerintahan moneter kota dan menangani pemerintahan kota dalam pertanggungjawaban harta benda yang diisolasi oleh kepala kota selaku pemegang kekuasaan administrasi moneter berkewajiban membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang membantu kepala kota dalam mewujudkan administrasi moneter kota. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) terdiri dari sekretaris kota, kepala segmen, dan pejabat keuangan kota. Sekretaris sebagai penyelenggara khusus untuk administrasi keuangan kota dipercayakan dengan laporan pemesanan dan tanggung jawab untuk penggunaan cadangan kota.

Sesuai dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016. Rekening kota adalah semua hak dan komitmen kota yang dapat dihargai secara tunai seperti halnya uang tunai dan produk yang diidentifikasi dengan penggunaan hak dan komitmen kota. Administrasi keuangan kota menggabungkan semua kegiatan yang terkait dengan pengaturan, penggunaan, pengaturan, pengungkapan, dan tanggung jawab keuangan kota.

Laporan moneter menggambarkan kondisi moneter dan efek samping dari bisnis organisasi pada waktu tertentu atau untuk jangka waktu tertentu, sehubungan dengan jenis laporan keuangan akan memberikan rincian mengenai pengakuan APB kota, laporan pertanggungjawaban untuk APB kota, meliputi

pemanfaatan aset, menulis tentang tanggung jawab pengakuan penggunaan APB kota (Harahap, 2015: 66).

Dari penjelasan diatas mengenai pengelolaan keuangan desa, dapat dipahami bahwa pengelolaan desa merupakan pengelolaan keuangan yang mencakup segala kegiatan yang ada di desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa, yang mana di antaranya yaitu pelaksanaan, perencanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Menurut soleh dan Rochmansjah (2015:43) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat diukur melalui beberapa indicator yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggungjawaban

2.5. Penelitian terdahulu

Penelitian ilmiah tentang Pengelolaan dana Desa belum banyak dilakukan, hal ini yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa. Untuk itu, sebagai landasan pustaka, peneliti menggunakan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan program Alokasi Dana Desa.

No	Nama	Judul	Indikator	Skala	Hasil Penelitian
1	Risya umami	Pengaruh transparansi	1.Keterbukaan dalam kerangka		1.transparansi berpengaruh terhadap

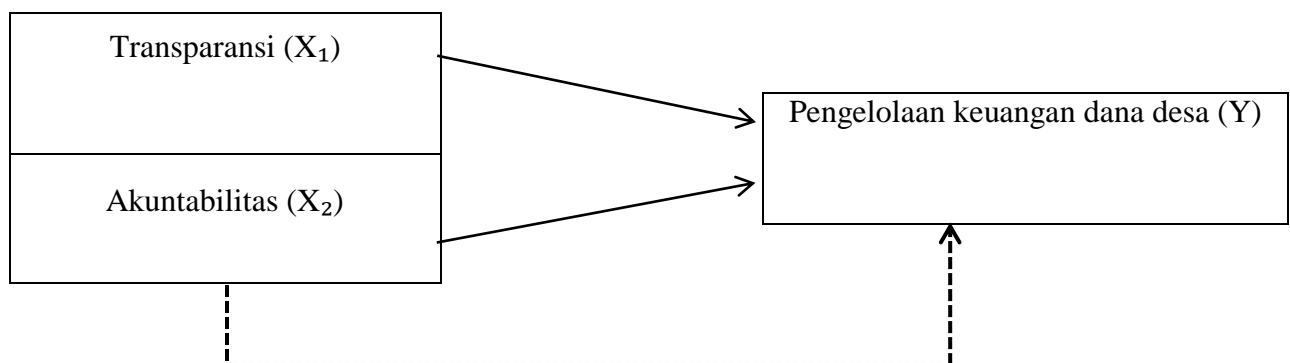
3.	arif indrajaya (2017)	pengaruh kompetensi aparatur desa dan implementasi Undang- undang No 6 tahun 2014 terhadap pengelolaan keuangan Dana Desa	sebuah keputusan 2.akurasi dan kelengkapan informasi 3.kejelasan dari sasaran kebijakan 4.penyebarluasan informasi 5.sistem informasi manajemen dan monitoring hasil	Likert	pengelolaan laporan keuangan dana desa. 2.implementasi Undang- undang No 6 tahun 2014 berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan dana desa. 3. kompetensi dan implementasi Undang- undang No 6 tahun 2014 berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa. 1.variabel transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 2.variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 3.variabel partisipasi
	Rizky amalia sugista (2017)	Pengaruh transparansi,	1.ada tidaknya kerangka kerja hukum 2.adanya akses masyarakat		

		akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa	terhadap transparansi anggaran 3.adanya audit yang independen dan efektif 4.adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan 5.anggaran.	Likert	masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa 4.transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan dana desa.
--	--	---	---	--------	---

Sumber :Afrizal 2018:20

2.6. Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

→ : variable secara parsial

--> : variable secara simultan

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai. Lalolo (2003:13).

Adapun indikator dari transparansi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum, atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Abdul Halim dan Muhammad Iqbal (2012:83).

Adapun indikator dari akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pertanggungjawaban hukum
- b. Pertanggungjawaban kinerja

- c. Pertanggungjawaban program
 - d. Pertanggungjawaban kebijakan
 - e. Pertanggungjawaban finansial
3. Pengelolaan Keuangan Desa

Sesuai dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016. Rekening kota adalah semua hak dan komitmen kota yang dapat dihargai secara tunai seperti halnya uang tunai dan barang dagangan yang diidentifikasi dengan penggunaan hak dan komitmen kota. Administrasi keuangan kota menggabungkan semua latihan yang terkait dengan pengaturan, pelaksanaan, pengorganisasian, perincian, dan tanggung jawab keuangan kota.

Adapun indikator pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan dan
- e. Pertanggungjawaban

2.7.Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013: 147), spekulasi adalah respon sementara terhadap perincian masalah eksplorasi, dimana definisi pemeriksaan telah dinyatakan sebagai penyelidikan, spekulasi seharusnya tidak kekal mengingat respon yang tepat diberikan. tergantung hipotesis. Spekulasi mengungkapkan hubungan yang dianggap cerdas antara setidaknya dua faktor. dalam rencana saran yang dapat dicoba secara eksperimental. Mengingat target audit dan

pemeriksaan tertulis, maka spekulasi yang dapat dibuat dalam investigasi ini adalah:

H1 :Transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa

H2 :Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa

H3 :Transparansi dan Akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa, Di Desa Iloheluma.

3.2 Desain Penelitian

Menurut Husaian Umar (2002:36), mengemukakan bahwa desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dan komprehensif mengenai hubungan-hubungan antar variable yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitian dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Dalam perencanaan tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, kegunaan tertentu. Sugiyono (2018:2)

3.3. Operasional Variabel Penelitian

Variable-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Transparansi dan Akuntabilitas sebagai variable bebas (X), sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan variable terikat (Y). Untuk penelitian ini diukur menggunakan skala likert,

Menurut Riduwan (2010:86) mengemukakan bahwa Skala likert digunakan untuk mengukur mentalitas, penilaian dan pandangan seseorang atau pertemuan kumpul-kumpul atau indikasi.

Dengan memanfaatkan skala likert, faktor yang akan diestimasi diubah menjadi pengukuran, pengukuran diubah menjadi sub faktor kemudian sub faktor tersebut diinterpretasikan kembali menjadi estimasi penunjuk. Artinya, penanda tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tahap awal pembuatan instrumen hal-hal sebagai pertanyaan dan penjelasan yang harus dijawab oleh responden. Setiap jawaban terkait dengan jenis pertanyaan atau disposisi yang dikomunikasikan dalam kata-kata.

Tabel 3.1 Bobot Alternatif Skala Likert

Pilihan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Riduwan 2010:86

Adapun operasional variable ini diharapkan dapat membantu para pembaca untuk memahami dengan mudah mengidentifikasi setiap variable yang ada dan memberikan batasan-batasan terhadap variable, untuk lebih jelasnya lihat table 3.2

Tabel 3.2 Operasional Variabel penelitian

Variable	Indikator	Skala
Transparansi (X_1)	a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen b. Kejelasan dan kelengkapan informasi c. Keterbukaan proses d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi	Ordinal
Akuntabilitas (X_2)	a. Pertanggungjawaban hukum b. Pertanggungjawaban kinerja c. Pertanggungjawaban program d. Pertanggungjawaban kebijakan e. Pertanggungjawaban finansial	Ordinal

Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan dan e. Pertanggungjawaban	Ordinal

Sumber Afrizal : 2018

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut Margono (2004), Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian para peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi ini juga berkaitan berkaitan dengan data-data. Apabila manusia memberikan suatu data, maka jumlah populasi tersebut akan sesuai dengan banyaknya manusia.

Menurut Nazir (1983), mengemukakan bahwa populasi berkenaan dengan data, bukan orang atau bendanya, adapun menurut Riduwan (2010:55) populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Menurut sugiyono (2018:126), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya. Dengan demikian Populasi adalah sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Sasaran populasi dalam penelitian ini adalah 30 orang pada desa Iloheluma.

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018:127), Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Maka sampel dalam penelitian ini diambil dari populasi sebagai responden. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 orang yang terdiri dari Kepala desa 1 orang, Sekretaris desa 1 orang, kaur 5 orang, kasie pelayanan 1 orang, operator 3 orang, staf keuangan 1 orang, staf kantor desa 1 orang, Masyarakat 17 orang yang tingkat pendidikannya Srata satu.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data sebagai bahan dalam penyusunan penelitian ini, maka digunakan metode sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literature-literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data-data yang dapat diperoleh lewat penelitian Kepustakaan ini merupakan data sekunder.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang akan dianalisis selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Data primer ini terutama diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara sebagai berikut :

1. Dokumentasi, Yaitu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Kuisioner, Yaitu menyebarkan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Jenis dan Sumber Data

3.6.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dalam bentuk angka-angka tetapi, berupa gambaran umum organisasi, sejarah singkat organisasi, maupun informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data kuantitatif yaitu data yang dapat dihitung atau data yang berupa angka-angka yang akan diteliti dalam nilai atau ukuran yang relevan dalam penelitian ini.

3.6.2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu :

- a) Data primer, Yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian berupa data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui kuisioner atau penyebaran angket.
- b) Data sekunder, Yaitu data yang bersumber dari data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Dengan adanya masalah diatas maka dalam memecahkan permasalahan tersebut menggunakan Analisis Regresi Sederhana untuk mengukur besarnya pengaruh Variabel bebas (X) adalah Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Variabel terikat (Y) adalah Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun persamaan regresi sederhana yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots\dots$$

Dimana :

Y = Pengelolaan Keuangan Desa

a = Nilai Konstan atau nilai tetap

b = koefisien Variabel

X_1 = Transparansi

X_2 = Akuntabilitas

e = Standar error atau variable yang tidak diteliti

3.7.1. Analisis Korelasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur korelasi atau mencari besarnya hubungan antara variable bebas (X) dengan variable (Y). maka dalam pengujian ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{\sqrt{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}}{\sqrt{(n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2)(n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2)}}$$

Dimana :

r_{xy} : Besarnya hubungan antara variable bebas (X) dengan variabel terikat (Y)

n : Banyaknya populasi yang akan dijadikan responden

sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas antara validitas bebas (Transparansi dan Akuntabilitas) dengan variabel terikat (Pengelolaan keuangan desa) digunakan interpretasi seperti pada tabel berikut ini :

3.3. Interpretasi korelasi

Interpretasi koefisien	Keterangan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 - 0,599	Cukup tinggi
0,60 - 0, 799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber :Sugiyono 2012 : 231

3.7.2. Uji f (simultan)

Sebagaimana diindikasikan oleh Ghozali (2013: 98), uji F terukur secara fundamental menunjukkan apakah setiap faktor otonom atau faktor bebas yang diingat untuk model mempengaruhi variabel dependen atau variabel yang

membutuhkan. Untuk menguji spekulasi ini, pengukuran F digunakan dengan model dinamis yang menyertai:

1. Dengan asumsi harga F lebih penting dari 4, H_0 diberhentikan pada tingkat kepastian 5% pada akhirnya kita mengakui spekulasi elektif, yang menyatakan bahwa semua faktor otonom pada saat yang sama dan secara fundamental mempengaruhi yang membutuhkan variable
2. Membandingkan nilai F dan F yang ditentukan seperti yang ditunjukkan pada tabel, dalam hal harga F yang ditentukan lebih penting dari pada nilai F tabel, H_0 diberhentikan dan diakui H_a .

3.7.3. Uji t (parsial)

Menurut Ghazali (2013: 98), uji bedat digunakan untuk menguji sejauh mana pengaruh faktor bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara eksklusif dalam mengklarifikasi variabel yang membutuhkan secara tidak lengkap. Alasan dinamika yang digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut:

1. Jika kemungkinan harga signifikan $> 0,05$, maka teori tersebut diberhentikan. Spekulasi yang ditolak menyiratkan bahwa faktor bebas tidak memiliki dampak kritis pada variabel yang membutuhkan.
2. Dalam hal kemungkinan harga kritis $< 0,05$, teori tersebut diakui. Spekulasi tidak diberhentikan, yang menyiratkan bahwa faktor bebas secara signifikan mempengaruhi variabel yang membutuhkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Desa

Konon terdapat wilayah permukiman warga yang begitu luas membentang orang menyebutnya dusun *ALILOHUWAYO*. Wilayah ini merupakan dataran rendah yang ditumbuhi pepohonan dan padang rumput yang luas menghijau bak hamparan Permadani yang dibeberapa bagian terdapat Rawa-rawa yang menghiiasi setiap pemandangan dibagian selatan sedangkan dibagian utara merupakan Gunung dan Perbukitan dengan hutannya yang hijau membiru. Alilohuwayo merupakan penggalan kalimat dalam bahasa Gorontalo yang diambil dari kata “*ALI, LO dan HUWAYO* “. *ALI* berarti Sumur atau Lubang. *LO* berarti Milik atau Nya, sedangkan *HUWAYO* berarti Buaya.

Jadi alilohuwayo berarti Sumur Buaya. Orang mengatakan bahwa diwilayah ini banyak dijumpai binatang buaya yang hidup dirawa-rawa sehingga daerah ini lebih terkenal dengan sumur buaya yang dalam bahasa Gorontalo “*ALILOHUWAYO*” Dusun alilohuwayo merupakan bagian dari wilayah pemerintahan desa **Imbodu** hingga suatu ketika penduduk makin bertambah dengan adanya arus perpindahan penduduk, banyak yang berdatangan dari berbagai wilayah dan tinggal menetap di dusun Alilohuwayo. Oleh para pemuka masyarakat potensi ini tidaklah disia-siakan, pada setiap kesempatan mereka membahas masa depan dusun mereka maka bergulirlah sebuah ide bahwa

alilohuwayo harus berpisah dari desa induk dan menjadi sebuah desa yang mandiri.

Ide Pemekaran ini menular kemana-mana dan pusaran makin besar yang mampu menyedot segala aktivitas, perhatian dan pemikiran-pemikiran guna mewujudkan suatu harapan baru dalam tatanan kehidupan yang baru dan hanya dalam hitungan bulan segala sesuatu telah dipersiapkan dengan matang dan tibalah saat-saat yang sudah lama dinantikan Saatnya Pemekaran. Ketika itu masih ada satu hal yang teramat penting untuk keberlanjutan cita-cita ini yang seolah terlupakan oleh semua pelaku pemekaran yakni Nama dari desa dambaan ini. Semua pihak terperangah ketika salah seorang diantara mereka berseru dengan lantang bahwa “ Saudara-saudara inilah desa dambaan kita yakni Desa Iloheluma” sesaat Tokoh tersebut tertegun lalu dengan setengah berbisik dia bertanya kepada seorang teman disebelahnya “ desa wolo ye..? ” seolah mendengar apa yang dibisikkan oleh tokoh tadi para tokoh yang lain spontan mengerubutinya dan semua sepakat untuk mengadakan rapat kilat guna membahas nama yang tepat untuk desa mereka yang baru.

Dalam forum itu terjadi perdebatan yang alot ada yang bertahan dengan nama yang lama dengan alasan bahwa alilohuwayo sudah lama dikenal baik masyarakat didesa tatangga bahkan sampai ke kabupaten,namun sebagian lain mengajukan nama baru yang terdengar asing di telinga mereka ada yang setuju adapula yang tidak setuju. Karena tidak menemukan kata sepakat salah seorang diantara mereka berujar “ DULO ITO MO TIHELUMO LOMAYI” artinya marilah kita bersatu !. “Ya Helumo..... desa Helumo.....ya desa Helumo!”.

sebagian yang hadir serentak menyela. Sesaat hening semua peserta hanyut dalam pemikiran masing-masing.

Selang beberapa saat kemudian ada yang buka suara bagaimana kalau “ILOHELUMA..... Desa ILOHELUMA, hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. kata tokoh tadi, diantaranya :

- a. Pemekaran ini melalui proses yang panjang dan diselingi perdebatan yang terbilang alot.
- b. Pengambilan nama pun masih harus diperdebatkan.
- c. Penduduk desa berasal dari berbagai daerah, suku, dan agama.
- d. Secara geografis wilayah desa terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan, padang rumput, rawa-rawa dan hutan.

Berdasarkan alasan diatas dirasa tepat kalau “Ilo-Heluma” dengan makna ”Yang Bersatu ” menjadi nama desa kita. Masih kata tokoh tadi. Sedangkan kata “ Helumo” berarti “Bersatu” secara spontan tanpa ada perdebatan. Katanya Dengan penjelasan oleh tokoh tadi semua peserta rapat menerima, menyetujui dan menetapkan “ ILOHELUMA “ sebagai nama desa mereka yang baru.

Dan semenjak itu (tahun 1986) hingga sekarang dusun Alilohuwayo berubah menjadi desa yang disebut ILOHELUMA, penduduknya bersatu padu membangun desanya dalam bingkai Kerukunan, Kebersamaan dan Kebersatuan.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Variabel dalam penelitian ini yaitu Pengalaman Tranparansi (X1), Akuntabilitas (X2), sedangkan variabel (Y) Pengelolaan dana desa, adapun total pertanyaan/ Pernyataan sebanyak 27 item dan setiap item pertanyaan/ pernyataan direspon oleh 30 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendiskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya:

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 30 = 30$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 30 = 150$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{120}{5} = 24$$

Tabel 4.3

Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item

Range	Kategori
130 - 154	Sangat besar
105 - 129	Besar
80 - 104	Sedang
55 - 79	Kecil
30 - 54	Sangat kecil

Sumber : Data Olahan 2021

4.2.1. Tanggapan responden untuk variabel XI (Transparansi)

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/ Pernyataan pada masing-masing indikator untuk setiap variabel adalah sebagai berikut :

XI.1				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	3.3
2	Setuju	14	56	46.7
3	Netral	4	12	13.3
4	Tidak Setuju	5	10	16.7
5	Sangat Tidak Setuju	6	6	20.0
	Total	30	89	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama adalah sebanyak 1 responden yang menjawab sangat setuju, sebanyak 14 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab netral, 5 responden menjawab tidak setuju, 6 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 89, artinya ini termasuk kategori sedang.

XI.2				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	10	40	33.3
3	Netral	4	12	13.3
4	Tidak Setuju	12	24	40.0
5	Sangat Tidak Setuju	4	4	13.3
	Total	30	80	100

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kedua, 10 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab netral, 12 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 80, ini masuk kategori sedang.

XI.3				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0		0
2	Setuju	7	28	23.3
3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	7	14	23.3
5	Sangat Tidak Setuju	11	11	36.7
	Total	30	68	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketiga, 7 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 7 responden menjawab tidak setuju, 11 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 68, ini masuk kategori kecil.

XI.4				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	4	16	13.3
3	Netral	6	18	20.0
4	Tidak Setuju	13	26	43.3
5	Sangat Tidak Setuju	7	7	23.3
	Total	30	67	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item keempat, 4 responden menjawab setuju, 6 responden menjawab netral, 13 responden, 7 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 67, ini masuk kategori kecil.

XI.5				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	9	36	30.0

3	Netral	6	18	20.0
4	Tidak Setuju	12	24	40.0
5	Sangat Tidak Setuju	3	3	10.0
	Total	30	81	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden item kelima, 9 responden menjawab setuju, 6 responden menjawab netral, 12 responden menjawab tidak setuju, 3 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 81, ini masuk kategori sedang.

XI.6				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	3.3
2	Setuju	8	32	26.7
3	Netral	4	12	13.3
4	Tidak Setuju	11	22	36.7
5	Sangat Tidak Setuju	6	6	20.0
	Total	30	77	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden item keenam, 1 responden menjawab sangat setuju, 8 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab netral, 11 responden menjawab tidak setuju, 6 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 78, ini masuk kategori kecil.

XI.7				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	4	20	13.3
2	Setuju	15	60	50.0
3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	4	8	13.3
5	Sangat Tidak Setuju	2	2	6.7
	Total	30	105	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketujuh, 4 responden menjawab sangat setuju, 15 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 4 responden menjawab tidak setuju, 2 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 105, ini masuk kategori besar.

XI.8				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	6	30	20.0
2	Setuju	15	60	50.0
3	Netral	1	3	3.3
4	Tidak Setuju	4	8	13.3
5	Sangat Tidak Setuju	4	4	13.3
	Total	30	105	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ke delapan, 6 responden menjawab sangat setuju, 15 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab netral, 4 responden menjawab tidak setuju, 4 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 105, ini masuk kategori besar.

XI.9				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	2	8	6.7
3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	12	24	40.0
5	Sangat Tidak Setuju	11	11	36.7
	Total	30	58	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kesembilan, 2 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 12

responden menjawab tidak setuju, 11 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 58, ini masuk kategori kecil.

4.2.2. Tanggapan responden untuk variabel X2 (Akuntabilitas)

X2.1				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	10	6.6
2	Setuju	8	32	26.7
3	Netral	12	36	40.0
4	Tidak Setuju	7	14	23.3
5	Sangat Tidak Setuju	1	1	3.3
	Total	30	93	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama sebanyak 2 responden yang menjawab sangat setuju, 8 responden menjawab setuju, 12 responden menjawab netral, 7 responden menjawab tidak setuju, 1 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 93, ini masuk kategori besar.

X2.2				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	10	6.7
2	Setuju	6	24	20.0
3	Netral	7	21	23.3
4	Tidak Setuju	9	18	30.0
5	Sangat Tidak Setuju	6	6	20.0
	Total	30	79	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kedua, 2 responden menjawab sangat setuju, 6 responden menjawab setuju, 7 responden menjawab netral, 9 responden menjawab tidak setuju, 6 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 79, ini masuk kategori kecil.

X2.3				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	3.3
2	Setuju	3	12	10.0
3	Netral	9	27	30.0
4	Tidak Setuju	10	20	33.3
5	Sangat Tidak Setuju	7	7	23.3
	Total	30	71	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketiga, 1 responden menjawab sangat setuju, 3 responden menjawab setuju, 9 responden menjawab netral, 10 responden menjawab tidak setuju, 7 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 71, ini masuk kategori kecil.

X2.4				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	10	6.7
2	Setuju	6	24	20.0
3	Netral	6	18	20.0
4	Tidak Setuju	10	20	33.3
5	Sangat Tidak Setuju	6	6	20.0
	Total	30	78	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan pada item keempat, 2 responden menjawab sangat setuju, 6 responden menjawab setuju, 6 responden menjawab netral, 10 responden menjawab tidak setuju, 6 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 78, ini masuk kategori kecil.

X2.5				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	40.0
2	Setuju	1	4	36.7

3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	11	22	3.3
5	Sangat Tidak Setuju	12	12	3.3
	Total	30	58	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden pada item kelima, 1 responden menjawab sangat setuju, 1 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 11 responden menjawab tidak setuju, 12 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 58, ini masuk kategori kecil.

X2.6				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	3.3
2	Setuju	9	36	30.0
3	Netral	1	3	3.3
4	Tidak Setuju	8	16	26.7
5	Sangat Tidak Setuju	11	11	36.7
	Total	30	71	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden pada item keenam, 1 responden menjawab sangat setuju, 9 responden menjawab setuju, 1 responden menjawab netral, 8 responden menjawab tidak setuju, 11 menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 71, ini masuk kategori kecil.

X2.7				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	15	10.0
2	Setuju	3	12	10.0
3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	7	14	23.3
5	Sangat Tidak Setuju	12	12	40.0
	Total	30	68	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketujuh, 3 responden menjawab sangat setuju, 3 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 7 responden menjawab tidak setuju, 12 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor 68, dan ini masuk kategori kecil.

X2.8				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	4	16	13.3
3	Netral	6	18	20.0
4	Tidak Setuju	10	20	33.3
5	Sangat Tidak Setuju	10	10	33.3
	Total	30	64	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kedelapan, 4 responden menjawab setuju, 6 responden menjawab netral, 10 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 64, ini masuk kategori kecil.

X2.9				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	10	6.7
2	Setuju	3	12	10.0
3	Netral	8	24	26.7
4	Tidak Setuju	7	14	23.3
5	Sangat Tidak Setuju	10	10	33.3
	Total	30	70	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kesembilan, 2 responden menjawab sangat setuju, 3 responden menjawab setuju, 8 responden menjawab netral, 7 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 70, ini masuk kategori kecil.

4.2.3. Tanggapan responden untuk variabel Y (pengelolaan dana desa)

Y.1				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	2	8	6.7
3	Netral	10	30	33.3
4	Tidak Setuju	11	22	36.7
5	Sangat Tidak Setuju	7	7	23.3
	Total	30	67	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item pertama, 2 responden menjawab setuju, 10 responden menjawab netral, 11 responden menjawab tidak setuju, 7 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 67, ini masuk kategori kecil.

Y.2				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	6	24	20.0
3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	13	26	43.3
5	Sangat Tidak Setuju	6	6	20.0
	Total	30	71	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kedua, 6 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 13 responden menjawab tidak setuju, 6 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 71, ini masuk kategori kecil.

Y.3				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	0	0	0
2	Setuju	2	8	6.7
3	Netral	4	12	13.3
4	Tidak Setuju	15	30	50.0

5	Sangat Tidak Setuju	9	9	30.0
	Total	30	59	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketiga, 2 responden menjawab setuju, 4 responden menjawab netral, 15 responden menjawab tidak setuju, 9 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 59, ini masuk kategori kecil.

Y.4				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	3.3
2	Setuju	2	8	6.7
3	Netral	6	18	20.0
4	Tidak Setuju	11	22	36.7
5	Sangat Tidak Setuju	10	10	33.3
	Total	30	63	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item keempat, 1 responden menjawab sangat setuju, 2 responden menjawab setuju, 6 responden menjawab netral, 11 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 63, ini masuk kategori kecil.

Y.5				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	3	15	10.0
2	Setuju	8	32	26.7
3	Netral	9	27	30.0
4	Tidak Setuju	5	10	16.7
5	Sangat Tidak Setuju	5	5	16.7
	Total	30	89	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item kelima, 3 responden menjawab sangat setuju, 8 responden menjawab setuju, 9 responden menjawab netral, 5 responden menjawab tidak setuju, 5 responden

menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 89, ini masuk kategori sedang.

Y.6				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	2	10	6.7
2	Setuju	1	4	3.3
3	Netral	7	21	23.3
4	Tidak Setuju	15	30	50.0
5	Sangat Tidak Setuju	5	5	16.7
	Total	30	70	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item keenam, 2 responden menjawab sangat setuju, 1 responden menjawab setuju, 7 responden menjawab netral, 15 responden menjawab tidak setuju, 5 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 70, ini masuk kategori kecil.

Y.7				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	1	5	3.3
2	Setuju	5	20	16.7
3	Netral	5	15	16.7
4	Tidak Setuju	9	18	30.0
5	Sangat Tidak Setuju	10	10	33.3
	Total	30	68	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketujuh, 1 responden menjawab sangat setuju, 5 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab netral, 9 responden menjawab tidak setuju, 10 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 68, ini masuk kategori kecil.

Y.8				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	7	35	23.3
2	Setuju	15	60	50.0
3	Netral	2	6	6.7
4	Tidak Setuju	3	6	10.0
5	Sangat Tidak Setuju	3	3	10.0
	Total	30	110	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketujuh, 7 responden menjawab sangat setuju, 15 responden menjawab setuju, 2 responden menjawab netral, 3 responden menjawab tidak setuju, 3 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 110, ini masuk kategori besar.

Y.9				
No	Tanggapan Responden	Frek	Skor	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	8	40	26.7
2	Setuju	17	68	56.7
3	Netral	0	0	0
4	Tidak Setuju	0	0	0
5	Sangat Tidak Setuju	5	5	16.7
	Total	30	113	100

dari tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden pada item ketujuh, 8 responden menjawab sangat setuju, 17 responden menjawab setuju, 5 responden menjawab sangat tidak setuju dari 30 total responden, dan total skor adalah 113, ini masuk kategori besar.

4.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.3.1. Analisis Data

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Tranparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) terhadap pengelolaan keuangan

desa (Y). Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Selengkapnya ada pada lampiran)

Tabel 4.4 Hasil Analisis Regresi linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.661	5.208		2.815	.009
X1	.263	.186	.258	1.414	.169
X2	.114	.098	.211	1.161	.256

a. Dependent Variable: Y

Model persamaan regresi yang dapat di gambarkan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut :

$$Y = 14,661 + (0,263X1) + (0,114 X2) + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

Konstanta (a) yang didapatkan nilai sebesar 14,661. Koefisien regresi untuk variabel X1 transparansi sebesar 0,263 artinya nilai variabel X1 adalah positif, atau setiap peningkatan transparansi akan mempengaruhi pengelolaan keuangan desasebesar 0,263. Koefisien regresi untuk variabel X2 sebesar 0.114artinya kontribusi akuntabilitas (X2) terhadappengelolaan dana desa adalah positif artinya setiap peningkatan variabel X2 akan mempengaruhi pengelolaan dana desa sebesar 0,114.

Table 4.5 Koefisien Determinasi**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.326 ^a	.106	.040	4.467	.106	1.601	2	27	.220

a. Predictors: (Constant),
X2, X1

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,106 memiliki makna bahwa 10,6% variasi naik turunnya variabel (Y) pengelolaan dana desa mampu dijelaskan oleh variabel transparansi (X1) dan akuntabilitas (X2). Sedangkan sisanya sebesar $100 - 10,6\% = 89,4\%$ dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H_1), hipotesis kedua (H_2) dan Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap Y maka dilakukan uji-t. Uji-t dilakukan untuk membandingkan nilai t_{tabel} dan nilai t_{hitung} pada taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$), maka hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya jika nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} ($t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$), maka hipotesis penelitian ditolak. Adapun nilai t_{tabel} untuk $\alpha = 5\%$.

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat

diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

H_1 :Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda diperoleh nilai t_{hitung} 1,414. Nilai ini lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 1,697 (t_{hitung} 1,414 < t_{tabel} 1,697) nilai t hitung menunjukkan angka positif terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,169 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma tidak sepenuhnya di terima.

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H_2)

H_2 :Akuntabilitasberpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa diDesa Iloheluma.

Berdasarkan perhitungan analisis regresi diperoleh t_{hitung} sebesar 1,161. Nilai ini lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 1,697 (t_{hitung} 1,161 < t_{tabel} 1,697) nilai t hitung menunjukkan angka positif terhadap pengelolaan keuangan desa, dengan nilai signifikansi sebesar 0,256 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan Akuntabilitas

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma. tidak sepenuhnya di terima.

4.3.3. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Pengujian hipotesis uji-F digunakan untuk melihat pengujian signifikansi koefisien regresi secara bersama-sama atau secara keseluruhan (*Testing The Overall Significance of Regression*). Pengujian hipotesis Uji-F dilihat melalui uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan tingkat signifikansi dengan (*probabilityvalue*) yang ditetapkan untuk penelitian ini dengan *probability value* lebih kecil dari 0,05. Hasil regresi dari Uji-F dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4.6 Hasil regresi Uji-F
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	63.884	2	31.942	1.601	.220 ^a
	Residual	538.783	27	19.955		
	Total	602.667	29			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil olahan data, 2021

Pengujian terhadap hipotesis keempat yaitu pengaruh variabel indepeden terhadap variabel dependen secara simultan menggunakan uji F.

H3 :Transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma.

Berdasarkan perhitungan regresi sederhana pada tabel di atas, nampak bahwa nilai F_{hitung} lebih kecil dari nilai F_{tabel} ($1,601 < 1,84$) nilai f hitung menunjukkan angka positif terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai probabilitas sebesar 0,220 angka ini lebih besar dari taraf signifikansi yang telah ditentukan yaitu sebesar 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Ilohelumatidak sepenuhnya di terima.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis penelitian yang menyatakan Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma tidak sepenuhnya di terima.
2. Hipotesis penelitian yang menyatakan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma tidak sepenuhnya di terima.
3. Hipotesis penelitian yang menyatakan transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Iloheluma tidak sepenuhnya di terima.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut ;

1. Dalam pengelolaan keuangan desa lebih di kelola secara transparan agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan.
2. Dalam pengelolaan keuangan desa lebih di kelola secara akuntabel agar pemanfaatan sumberdaya yang ada lebih efektif dan efisien.

3. Diharapkan kepada peneliti yang akan datang yang ingin meneliti dalam bidang yang sama agar menambah variabel lain yang ikut memperkuat pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adianto Asdi Sangki. 2016.*Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (suatu studi di desa tandu kecamatan lolok Kabupaten Bolaang Mongondow)*.Skripsi Universitas Sam ratulangi Kota Manado,Sulawesi Utara.
- Afrizal. 2018.*Pengaruh transparansi, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa*. Universitas Mitra Indonesia.
- Atik Rusmayanti. 2014. *Sistem informasi pengelolaan keuangan pada desa ngadirejan*, Jurnal Volume 6, No 2 ISSN : 1979-9330.
- Amrizal Imawan. 2019.*Peran akuntabilitas pemerintah desa dalam membangun kepercayaan publik*. Jurnal Volume 10, No 1 ISSN : 2086-7603 e-ISSN : 2089-5879
- Arif Widyatama. 2017.*Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa (ADD)*. Volume 2, No 2. Stie Panca Bhakti Palu.
- Amin Rahmanurrasjid. 2008.*Akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggung jawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik didaerah (studi di kabupaten kebumen)* Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Choirul Anam. 2018.*Analisis dampak transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap tingkat kemiskinan*. Jurnal Volume 2, No 2. e-ISSN : 2614-6274.
- Deti kumalasari. 2016. *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa*. Jurnal Volume 5, No 11. ISSN : 2460-0585.
- Devi indra kartika, 2019. *Pengaruh akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (survey pada kecamatan tebing, kabupaten empat lawing)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Fitri sukmawati. 2019.*Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Volume 2, No 1. Universitas Widyatama.
- Friend jeinold pasuhuk, 2018.*Transparansi pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa nazaret kecamatan ratahan timur, kabupaten minahasa tenggara*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi.
- Geinata m.loho, 2018.*Transparansi pengelolaan dana desa oleh kapitalau dalam pembangunan jalan di desa apelawa kecamatan siau timur, kabupaten kepulauan siau tagulandang biaro*. Jurnal Volume 1, No 1. ISSN : 2337-5736.
- Hery. 2009. *Teori akuntansi edisi pertama*. Jakarta : Prenadamedia Group cv.
- Krismiaji. 2015. *Sistem informasi akuntansi*. Edisi keempat. Yogyakarta; UPP STIM YKPN
- Maria Magdalena hesti kurniawati. 2016.*Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah akseibilitas laporan keuangan daerah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten jember)*. Skripsi Universitas jember.
- Muchammad yafits hidayatullah. 2018.*Akuntabilitas pemerintah desa (studi pengelolaan dana pada desa wonojero kecamatan wonojero kabupaten pasuruan)* Skripsi Universitas Islam Malang.
- M.irwan tahir. 2017.*Model efektivitas organisasi pemerintah desa*. Jurnal Volume 19 N0 3 ISSN : 233-237.
- Muhammad zainul abiding. 2015.*Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Volume 6, No 1.
- Putra adi kurniawan 2019.*Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (studi pada desa se-kecamatan wates,kabupaten kulon progo)*. Skripsi Universitas muhammadiyah magelang.

- Risky amalia sugista. 2017.*Pengaruh transparan, akuntabilitas dan partisipan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa*. Skripsi Universitas lampung.
- Rahmi fajri. 2015.*Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (studi pada kantor desa ketindan, kecamatan lqwang, kabupaten malang)*.Jurnal Volume 3, No 7. ISSN : 1099-1104.
- Rilmayanti.2020. *Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan burau kabupaten luwu timur*.Jurnal Volume 4, No 1. ISSN : 2339-1502.
- Risya umami 2017.*Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa*. Jurnal Volume 6, No 11. ISSN : 2088-6969.
- Saiful ichwan 2019.*Implementasi penyelenggaraan pemerintah desa*. Jurnal Volume 5, No 1. Universitas Muhammadiyah Sorong.
- Suci indah hanifah 2015.*Akuntabilitas dan transparansi pertanggung jawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)*. Jurnal Volume 4, No 8. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Siti khusniyatun 2016.*Determinan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. (studi pada pamong desa di wilayah kabupaten kebumen)*.Skripsi. Universitas negeri semarang.
- Sidiq wahyu Ramadan, 2019.*Pengaruh kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan pemanfaatan teknologi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi empiris pada pemerintah desa di kecamatan bendosari, kecamatan polokarto, dan kecamatan mojolaban di kabupaten sukoharjo*.Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Siti sueb junaroh, 2018.*Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (pada desa se-kecamatan kertosono kabupaten nganjuk)*. Skripsi Universitas jember.
- Sugiono. 2018. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta cv.
- Sugiono. 2012. *Statistika untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta cv.

JADWAL PENELITIAN

Kegiatan	Tahun 2020																																																
	Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sep				Oktbr				Nov				Des								
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
Observasi																																																	
Usulan Judul																																																	
Penyusunan proposal & bimbingan																																																	
Ujian Proposal																																																	
Revisi Proposal																																																	

Kegiatan	Tahun 2021																																											
	Jan				Feb				Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Ags				Sep				Oktbr				Nov			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
Pengolahan Data &bimbingan																																												
Ujian Skripsi																																												
Revisi Skripsi																																												

Lampiran 1. kuisioner

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat

Nama : Yulpika

Nim : E111.91.51

Jurusan : Akuntansi

Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Dalam rangka penelitian untuk menyusun tugas akhir, sebagai syarat menyelesaikan studi srata satu universitas ichsan gorontalo. dengan ini saya mohon bantuan dan kesediaan bapak/ibu/sdr. untuk bersedia menjadi responden dalam penelitian saya. angket ini ditujukan untuk diisi oleh bapak/ibu/sdr, dengan menjawab seluruh pertanyaan yang telah disediakan. saya mengharapkan jawaban bapak/ibu/sdr, berikan nantinya adalah jawaban obyektif, jujur, dan apa adanya agar diperoleh hasil maksimal. dalam pengisian koesioner ini, bapak/ibu/sdr, cukup memilih pada pilihan jawaban yang telah disediakan. saya akan menjamin kerahasiaan data yang bapak/ibi/sdr, berikan karena jawaban tersebut hanya sebagai bahan penelitian dan tidak dipublikasikan.

Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui “ PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA ILOHELUMA KEC.PATILANGGIO KAB.POHUWATO”.

Kuesioner Transparansi (X₁)

Pernyataan dibawah ini dijawab dengan kode “√” pada kolom yang telah disediakan

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Ketersediaan informasi yang berhubungan dengan dokumen dapatdiketahui oleh masyarakat					
2	aksebilitas yang berhubungan dengandokumen mudah diketahui oleh masyarakat					
3	Infomasi mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program) oleh masyarakat					

4	Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum					
5	Adanya website atau media publikasi organisasi					
6	Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya					
7	Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat					
8	Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)					
9	Keterbukaan register yang bersifat fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll).					

Kuesioner Akuntabilitas (X₂)

Pernyataan dibawah ini dijawab dengan kode “√” pada kolom yang telah disediakan

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hokum					
2	Akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat					
3	Pertanggungjawaban kinerja telah melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien					
4	program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program					
5	Adanya pertimbangan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan					
6	Adanya pertanggungjawaban aparatur desa dalam menggunakan dana desa secara ekonomis, efisien dan efektif					
7	Adanya laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar					
8	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standard prosedur pelaksanaan					
9	Adanya sanksi ketetapan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan					

Kuesioner pengelolaan dana desa (Y)

Pernyataan dibawah ini dijawab dengan kode “√” pada kolom yang telah disediakan

No	Pernyataan	SS	S	RG	TS	STS
1	Kegiatan perencanaan, dalam penyusunan APBDesa yang ditetapkan telah sesuai dengan fungsi, ketentuan, struktur, sampai mekanisme penyusunannya					
2	Adanya perencanaan dalam pemanfaatan ADD mengacu pada asas-asas pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014					
3	Adanya penatausahaan keuangandes desa memenuhi standar dalam peraturan undang-undang tentang desa					
4	Pelaporan Adanya laporan mengenai rincian dana penggunaan keuangan desa kepada masyarakat					
5	Adanya laporan akhir oleh tim pelaksana mengenai perkembangan pelaksanaan					

6	Adanya laporan realisasi pelaksanaan APB Desa					
7	Adanya proses dan pertanggungjawaban dalam perancangan anggaran diawasi secara terus-menerus					
8	Adanya rencana strategi dan arah kebijakan umum dalam pengelolaan anggaran					
9	Asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran					

Lampiran 2. Tabualsi data Transparansi (X1)

NO	TRANSPARANSI X1									
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1
1	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
2	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
3	2	3	4	4	3	5	3	4	2	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	37
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
7	4	4	3	4	4	4	4	5	4	36
8	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
9	4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
10	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
11	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
12	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
13	4	4	4	4	4	4	4	5	5	38
14	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
15	4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
16	5	5	5	4	4	4	5	4	4	40
17	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
18	5	5	5	4	4	4	5	4	4	40
19	5	5	5	4	4	4	4	4	4	39
20	5	5	5	4	4	4	5	4	4	40
21	5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
22	3	2	4	4	3	5	3	5	2	31
23	4	3	5	3	4	5	4	5	5	38
24	3	4	5	4	4	4	4	4	4	36
25	5	5	4	4	5	5	5	5	4	42
26	5	5	5	5	4	5	5	5	4	43
27	4	5	5	4	4	3	4	4	4	37
28	4	4	4	4	5	4	5	5	5	40
29	5	5	5	5	4	5	5	5	4	43
30	4	5	5	4	4	4	4	5	5	40

TABULASI DATA AKUNTABILITAS (X2)

AKUNTABILITAS X2									
X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2
3	4	5	5	5	5	5	5	4	41
4	4	4	5	4	5	3	4	4	37
4	4	4	4	44	4	4	4	3	75
4	2	5	3	5	3	5	5	5	37
3	4	3	2	4	5	2	3	5	31
4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
4	4	5	4	4	5	4	4	4	38
4	5	5	4	4	5	4	4	4	39
4	5	4	4	4	5	4	5	3	38
4	4	4	5	4	4	3	4	4	36
4	4	4	4	5	4	4	5	5	39

5	5	5	4	4	5	4	4	5	41
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	5	5	4	4	38
4	4	5	4	4	4	4	3	4	36
4	4	5	4	4	4	5	4	4	38
4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
4	4	3	4	4	5	4	4	4	36
4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
5	4	4	5	4	4	5	4	4	39
3	4	3	2	4	5	2	3	5	31
5	4	4	5	4	4	5	4	5	40

TABULASI DATA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Y)

PENGELOLAAN DANA DESA Y									
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y
5	5	5	5	5	5	5	4	4	43
4	4	4	5	5	5	5	4	4	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	3	5	4	5	4	5	4	39
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
5	4	4	5	5	4	5	5	5	42
4	5	4	4	4	4	5	5	5	40
4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
4	5	5	5	5	4	5	5	5	43
4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	3	4	4	4	4	5	5	5	38
4	4	3	4	4	2	4	4	4	33

4	5	5	5	4	4	4	4	4	39
5	5	4	4	5	5	5	5	5	43
5	5	5	5	5	4	4	4	4	41
4	4	4	4	4	4	5	5	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	5	4	4	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	5	4	4	5	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	5	5	4	38

Lampiran 3. Data frekuensi

Frequency Table

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	20.0	20.0	20.0
	2	5	16.7	16.7	36.7
	3	4	13.3	13.3	50.0
	4	14	46.7	46.7	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	13.3	13.3	13.3
	2	12	40.0	40.0	53.3
	3	4	13.3	13.3	66.7

4	10	33.3	33.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	11	36.7	36.7	36.7
2	7	23.3	23.3	60.0
3	5	16.7	16.7	76.7
4	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	7	23.3	23.3	23.3
2	13	43.3	43.3	66.7
3	6	20.0	20.0	86.7
4	4	13.3	13.3	100.0

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	23.3	23.3	23.3
	2	13	43.3	43.3	66.7
	3	6	20.0	20.0	86.7
	4	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	10.0	10.0	10.0
	2	12	40.0	40.0	50.0
	3	6	20.0	20.0	70.0
	4	9	30.0	30.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	20.0	20.0	20.0
	2	11	36.7	36.7	56.7
	3	4	13.3	13.3	70.0
	4	8	26.7	26.7	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	2	4	13.3	13.3	20.0
	3	5	16.7	16.7	36.7
	4	15	50.0	50.0	86.7
	5	4	13.3	13.3	100.0

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	6.7	6.7	6.7
	2	4	13.3	13.3	20.0
	3	5	16.7	16.7	36.7
	4	15	50.0	50.0	86.7
	5	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	13.3	13.3	13.3
	2	4	13.3	13.3	26.7
	3	1	3.3	3.3	30.0
	4	15	50.0	50.0	80.0
	5	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	36.7	36.7	36.7
	2	12	40.0	40.0	76.7
	3	5	16.7	16.7	93.3
	4	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Frequency Table X2**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	2	7	23.3	23.3	26.7
	3	12	40.0	40.0	66.7
	4	8	26.7	26.7	93.3
	5	1	3.3	3.3	96.7
	42	1	3.3	3.3	100.0

X2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	3.3	3.3	3.3
	2	7	23.3	23.3	26.7
	3	12	40.0	40.0	66.7
	4	8	26.7	26.7	93.3
	5	1	3.3	3.3	96.7
	42	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	20.0	20.0	20.0
	2	9	30.0	30.0	50.0
	3	7	23.3	23.3	73.3
	4	6	20.0	20.0	93.3
	5	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	23.3	23.3	23.3
	2	10	33.3	33.3	56.7
	3	9	30.0	30.0	86.7
	4	3	10.0	10.0	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	20.0	20.0	20.0
	2	10	33.3	33.3	53.3
	3	6	20.0	20.0	73.3
	4	6	20.0	20.0	93.3
	5	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	40.0	40.0	40.0
	2	11	36.7	36.7	76.7
	3	5	16.7	16.7	93.3
	4	1	3.3	3.3	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	36.7	36.7	36.7
	2	8	26.7	26.7	63.3
	3	1	3.3	3.3	66.7
	4	9	30.0	30.0	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	40.0	40.0	40.0
	2	7	23.3	23.3	63.3
	3	5	16.7	16.7	80.0
	4	3	10.0	10.0	90.0
	5	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	33.3	33.3	33.3
	2	10	33.3	33.3	66.7
	3	6	20.0	20.0	86.7
	4	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	33.3	33.3	33.3
	2	7	23.3	23.3	56.7
	3	8	26.7	26.7	83.3
	4	3	10.0	10.0	93.3
	5	2	6.7	6.7	100.0
Total		30	100.0	100.0	

Frequency Table Y

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	23.3	23.3	23.3
	2	11	36.7	36.7	60.0
	3	10	33.3	33.3	93.3
	4	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	20.0	20.0	20.0
	2	13	43.3	43.3	63.3
	3	5	16.7	16.7	80.0
	4	6	20.0	20.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	30.0	30.0	30.0
	2	15	50.0	50.0	80.0
	3	4	13.3	13.3	93.3
	4	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	33.3	33.3	33.3
	2	11	36.7	36.7	70.0
	3	6	20.0	20.0	90.0
	4	2	6.7	6.7	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	16.7	16.7	16.7
	2	5	16.7	16.7	33.3
	3	9	30.0	30.0	63.3
	4	8	26.7	26.7	90.0
	5	3	10.0	10.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	16.7	16.7	16.7
	2	15	50.0	50.0	66.7
	3	7	23.3	23.3	90.0
	4	1	3.3	3.3	93.3
	5	2	6.7	6.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	33.3	33.3	33.3
	2	9	30.0	30.0	63.3
	3	5	16.7	16.7	80.0
	4	5	16.7	16.7	96.7
	5	1	3.3	3.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	10.0	10.0	10.0
	2	3	10.0	10.0	20.0
	3	2	6.7	6.7	26.7
	4	15	50.0	50.0	76.7
	5	7	23.3	23.3	100.0

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	10.0	10.0	10.0
	2	3	10.0	10.0	20.0
	3	2	6.7	6.7	26.7
	4	15	50.0	50.0	76.7
	5	7	23.3	23.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Y.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	16.7	16.7	16.7
	4	17	56.7	56.7	73.3
	5	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 6. Tabel r dan Tabel F

Tabel r

df – (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Tabel t

d.f	$t_{0.10}$	$t_{0.05}$	$t_{0.025}$	$t_{0.01}$	$t_{0.005}$	d.f
1	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	1
2	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	2
3	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	3
4	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	4
5	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	5
6	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	6
7	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	7
8	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	8
9	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	9
10	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	10
11	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	11
12	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	12
13	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	13
14	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	14
15	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	15
16	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	16
17	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	17
18	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	18
19	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	19
20	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	20
21	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	21
22	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	22
23	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	23
24	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	24
25	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	25
26	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	26
27	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	27
28	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	28
29	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	29
30	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	30
31	1,309	1,696	2,040	2,453	2,744	31
32	1,309	1,694	2,037	2,449	2,738	32
33	1,308	1,692	2,035	2,445	2,733	33
34	1,307	1,691	2,032	2,441	2,728	34
35	1,306	1,690	2,030	2,438	2,724	35
36	1,306	1,688	2,028	2,434	2,719	36
37	1,305	1,687	2,026	2,431	2,715	37
38	1,304	1,686	2,024	2,429	2,712	38
39	1,303	1,685	2,023	2,426	2,708	39

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

19164 PIP/LEMLIT-UNISAN/II/2021

yang bertanda tangan di bawah ini:

: Zulham, Ph.D
: 0911108104

: Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Yulpika

NIM : E1119151

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Iloheluma

Judul penelitian : Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Iloheluma

Sebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 02 Februari 2021
Ketua,

Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104

PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
KECAMATAN PATILANGGIO
DESA ILOHELUMA

SURAT IZIN

Nomor : 500/DIL-PTLG/ SI / 27 / II / 2021

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: AGUS HIPPI, S.AP

Jabatan

: Kepala Desa Iloheluma

Alamat

: Desa Iloheluma Kec. Patilanggio, Kab. Pohuwato

Memberikan izin kepada :

Nama

: YULPIKA

NIM

: E1119151

Fakultas

: Ekonomi

Program Studi

: Akuntansi

Berdasarkan Surat Permohonan Universitas Ichsan Gorontalo Nomor
106/PIP/LEMLIT-UNISAN/I/2011, maka sehubungan dengan hal tersebut, saya memberikan
kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian di Kantor Desa Iloheluma

Demikian surat izin ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan
lunya.-





SKRIPSI TURNITIN YULPIKA revisi.docx
Mar 12, 2021
10981 words / 71530 characters

UDAYAAN

/D/O/2001

) 829976 Gorontalo

E11.19.151

YULPIKA revisi.docx

Sources Overview

25%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.ut.ac.id	INTERNET	3%	
2	eprints.umm.ac.id	INTERNET	2%	
3	journal.unesa.ac.id	INTERNET	1%	
4	id.123dok.com	INTERNET	1%	
5	repository.uinsu.ac.id	INTERNET	1%	
6	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16	SUBMITTED WORKS	<1%	abilitas Terhadap
7	journal.iaingorontalo.ac.id	INTERNET	<1%	ia liheluma
8	jurnal.unigo.ac.id	INTERNET	<1%	
9	eprints.umm.ac.id	INTERNET	<1%	kasi Turnitin untuk
10	wartapenilai.id	INTERNET	<1%	an SK Rektor No.
11	repository.usu.ac.id	INTERNET	<1%	Penanggulangan
12	yukaristiawordpress.wordpress.com	INTERNET	<1%	uai dengan Surat
13	digilib.unila.ac.id	INTERNET	<1%	ahwa isi softcopy
14	repository.uin-suska.ac.id	INTERNET	<1%	nya serta format
15	www.pengadaan.web.id	INTERNET	<1%	, untuk itu skripsi
16	e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id	INTERNET	<1%	in.

M.Kom

'01

<https://i0449-consortium1.turnitin.com/view/cuberasions/ed20211587845/print/foalenen>
Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

17	nasional.kompas.com	INTERNET	<1%
18	eprints.undip.ac.id	INTERNET	<1%
19	repository.upi.edu	INTERNET	<1%
20	repo.stikesicme-jbg.ac.id	INTERNET	<1%
21	download.garuda.ristekdikti.go.id	INTERNET	<1%
22	text-id.123dok.com	INTERNET	<1%
23	elib.unikom.ac.id	INTERNET	<1%
24	eprints.unm.ac.id	INTERNET	<1%
25	www.utakatikotak.com	INTERNET	<1%
26	id.scribd.com	INTERNET	<1%
27	openaccess.maltepe.edu.tr	INTERNET	<1%
28	eprints.iain-surakarta.ac.id	INTERNET	<1%
29	pusatdatamalah.blogspot.com	INTERNET	<1%
30	Patras Thebora, Jenny Morasa, Sintje Rondonuwu. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI PELAPORA...	CROSSREF	<1%
31	riset.unisma.ac.id	INTERNET	<1%
32	konsultasiskripsi.com	INTERNET	<1%
33	akurat.co	INTERNET	<1%
34	caridokumen.com	INTERNET	<1%
35	123dok.com	INTERNET	<1%
36	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2020-05-15	SUBMITTED WORKS	<1%
37	eprints.uny.ac.id	INTERNET	<1%
38	repositori.uin-alauddin.ac.id	INTERNET	<1%
39	dspace.lu.lv	INTERNET	<1%
40	magussudrajat.blogspot.com	INTERNET	<1%

41	jurnal.untan.ac.id	INTERNET	<1%
42	pure.au.dk	INTERNET	<1%
43	repository.unhas.ac.id	INTERNET	<1%
44	jurnalwahana.aaykpn.ac.id	INTERNET	<1%
45	adoc.tips	INTERNET	<1%
46	ejournal.stiesia.ac.id	INTERNET	<1%
47	etheses.uin-malang.ac.id	INTERNET	<1%
48	modulakuntansionline.blogspot.com	INTERNET	<1%
49	repository.widyatama.ac.id	INTERNET	<1%
50	thesis.binus.ac.id	INTERNET	<1%
51	www.jurnalekonomi.unisla.ac.id	INTERNET	<1%
52	ejournal.stieyapman.ac.id	INTERNET	<1%
53	eprintslib.ummgl.ac.id	INTERNET	<1%

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 20 words).

Excluded sources:

- None

CURRICULUM VITAE

1. Identisa Pribadi



Nama	:	Yulpika
NIM	:	E11. 19.151
Tempat/Tgl Lahir	:	Lambunu, 12 Agustus 1998
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Jurusan	:	Akuntansi
Agama	:	Islam
Alamat	:	Desa Salumpungut Kec.Moutong Kab. Parigi Moutong

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 2 Bolano Kec. Bolano Lambunu pada tahun 2011
2. Kemudian melanjutkan Ke jenjang selanjutnya Yakni di Madrasah Tsanawiyah Negeri Moutong dan Lulus Pada tahun 2014
3. Kemudian Melanjutkan Ke jenjang berikutnya yakni di SMK DDI SIENDENG dan Lulus pada Tahun 2017
4. Dan kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya yakni di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Pohuwato (STIE Ichsan Pohuwato) dengan Jurusan Akuntansi Kemudian Pada tahun 2019 di konfersi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Allhamdulillah pada tahun 2020 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsaan Gorontalo

